

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022-2024 BERDASARKAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Manajemen



Disusun oleh:

**Maharani Nur Ma'virroh
NIM. 30402400088**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024 BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Disusun oleh:

Maharani Nur Ma'virroh

NIM : 30402400088

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke
hadapan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية
Semarang, 12 November 2025

Pembimbing,



Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.

NIDN. 0623036901

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024
BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY**

Disusun Oleh:

Maharani Nur Ma'virroh

30402400088

Pada tanggal, 12 November 2025

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing

Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.
NIK. 210416055

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen

UNISSULA
Mengetahui,
جامعة سلطان العلا
Kemula Program Studi Manajemen

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNISSULA
Dr. Luthi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.
NIK. 210416055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Maharani Nur Ma'virroh
NIM : 30402400088
Program studi : S1 Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024 BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 10 November 2025

Yang menyatakan,


Maharani Nur Ma'virroh

NIM. 30402400088

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maharani Nur Ma'virroh
NIM	: 30402400088
Program Studi	: S1 Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024 BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Memberi Pernyataan

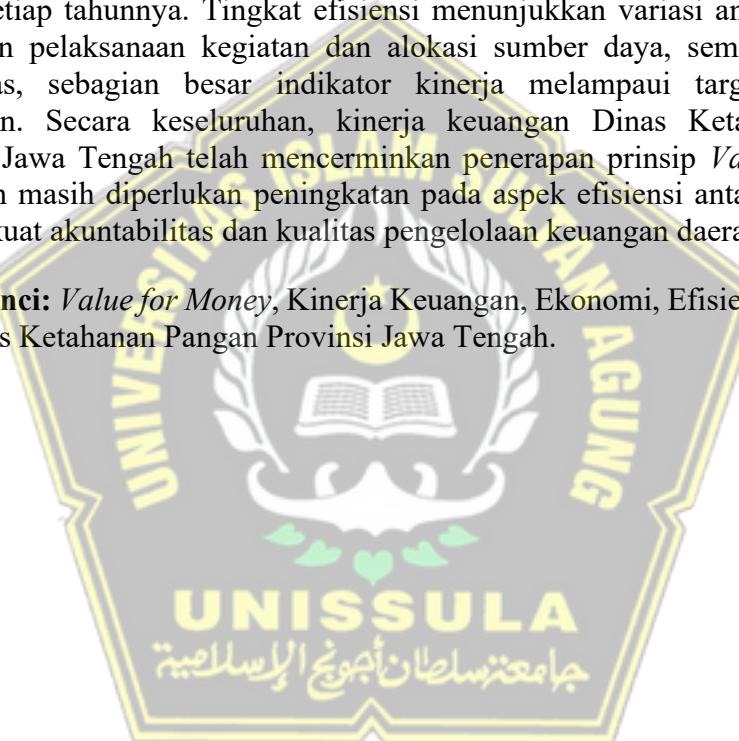


MAHARANI NUR MA'VIRROH
NIM. 30402400088

ABSTRAK

Value for Money (VfM) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan konsep *Value for Money*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022-2024 tergolong ekonomis dengan tingkat realisasi anggaran di atas 95 persen setiap tahunnya. Tingkat efisiensi menunjukkan variasi antartahun akibat perbedaan pelaksanaan kegiatan dan alokasi sumber daya, sementara dari sisi efektivitas, sebagian besar indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencerminkan penerapan prinsip *Value for Money*, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek efisiensi antarprogram guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

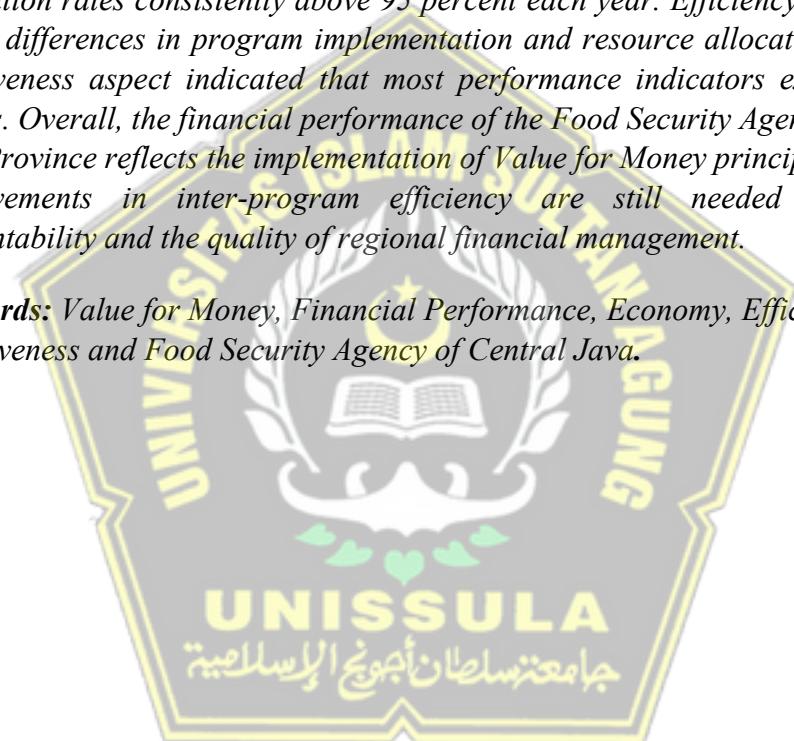
Kata Kunci: *Value for Money*, Kinerja Keuangan, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.



ABSTRACT

Value for Money (VfM) is a concept that emphasizes the importance of managing public finances economically, efficiently, and effectively to achieve optimal results. This study aims to analyze the financial performance of the Food Security Agency of Central Java for the fiscal years 2022–2024 using the Value for Money approach. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) and Government Agency Performance Reports (LKjIP) from Food Security Agency of Central Java Province in 2022-2024. The results show that during 2022-2024, the financial management of the Food Security Agency was categorized as economical, with budget realization rates consistently above 95 percent each year. Efficiency levels varied due to differences in program implementation and resource allocation, while the effectiveness aspect indicated that most performance indicators exceeded their targets. Overall, the financial performance of the Food Security Agency of Central Java Province reflects the implementation of Value for Money principles, although improvements in inter-program efficiency are still needed to enhance accountability and the quality of regional financial management.

Keywords: *Value for Money, Financial Performance, Economy, Efficiency, Effectiveness and Food Security Agency of Central Java.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 Berdasarkan Konsep *Value for Money*”**.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan penyelesaian studi Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari harapan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan kemudahan bagi hamba-Nya dalam segala urusan.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan proposal skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berharga.
5. Orang tua penulis, Ibu Eni Farianingsih dan Bapak Alm. Karman Kurniawan, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis untuk terus berusaha dan berjuang menggapai cita-cita. Semoga ibu penulis senantiasa diberikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian untuk bapak penulis, semoga amal ibadah beliau diterima dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
6. Kakak-kakak penulis, Nila Karina Dewi, Muhammad Bagas Mukti dan Bella Ade Savila yang selalu memberikan dukungan dan saran-saran yang membangun penulis untuk menggapai cita-cita.
7. Para sahabat dan rekan kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk penyusunan yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 10 November 2025

Peneliti,


Maharani Nur Ma'virroh
NIM. 30402400088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang Masalah	16
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 Kinerja Keuangan Sektor Publik	25
2.1.2 Konsep <i>Value for Money</i> (VfM)	26
2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
2.1.4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	30
2.1.5 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	31
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Posisi Hipotesis dalam Penelitian	34
2.4 Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.2.1 Populasi	38

3.2.2	Sampel.....	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5	Variabel dan Indikator Penelitian.....	40
3.5.1	Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	41
3.5.2	Ekonomis	41
3.5.3	Efisiensi.....	42
3.5.4	Efektivitas	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1	Langkah-langkah Analisis Data	44
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1	Profil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	48
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	49
4.1.3	Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah....	51
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah..	52
4.2	Data Laporan Keuangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024.....	60
4.2.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024	61
4.2.2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024.....	62
4.2.3	Keterkaitan LRA dan LKjIP dalam Analisis Value for Money	65
4.3	Analisis Data	67
4.3.1	Analisis Ekonomis	67
4.3.2	Analisis Efisiensi.....	70
4.3.3	Analisis Efektivitas	72
4.3.4	Kesimpulan Analisis Data.....	74
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	75
4.4.1	Pembahasan Aspek Ekonomis	76
4.4.2	Pembahasan Aspek Efisiensi.....	77
4.4.3	Pembahasan Aspek Efektivitas	79
4.4.4	Sintesis Hasil Penelitian.....	80

BAB V	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Implikasi.....	83
5.3 Keterbatasan Penelitian	85
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dishanpan Prov. Jateng.....	18
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Data LRA Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024	61
Tabel 4.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishanpan Jateng Tahun 2022-2024	63
Tabel 4.3 Hasil Analisis Data Berdasarkan konsep VfM	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep <i>Value for Money</i> (Mardiasmo:2009).....	26
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dishanpan Jateng	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data LRA Tahun Anggaran 2022.....	92
Lampiran 2 Data LRA Tahun Anggaran 2023.....	93
Lampiran 3 Data LRA Tahun Anggaran 2024.....	94
Lampiran 4 Halaman Sampul LKjIP Dishanpan Jateng TA. 2022-2024.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu indikator krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 283 ayat (1) yang menekankan asas efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, organisasi sektor publik mengemban amanah untuk mengelola sumber daya yang berasal dari rakyat demi kepentingan dan kesejahteraan publik. Namun, dalam praktiknya, sektor publik seringkali dihadapkan pada tantangan persepsi yang mengaitkannya dengan inefisiensi, pemborosan, atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Persepsi ini, sebagaimana disoroti oleh beberapa literatur yang menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2009). Reformasi dalam pengelolaan keuangan publik terus digalakkan, bergeser dari sekadar kepatuhan pada prosedur menjadi fokus pada realisasi atau hasil yang diciptakan dari setiap pengeluaran. Ini adalah esensi dari akuntabilitas publik, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan

harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan sebuah pilar fundamental atau pondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kemajuan suatu daerah, bukan hanya dalam konteks pembangunan nasional yang di dalamnya tidak hanya menyangkut ketersediaan fisik pangan atau ada dan tidak adanya pangan saja, namun juga menyangkut aspek keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan yang merata serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di setiap wilayah Indonesia. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang harus terus diperkuat. Provinsi Jawa Tengah, dengan kekayaan sumber daya alam dan pertaniannya, memegang peranan penting sebagai salah satu "lumbung pangan nasional". Sepanjang tahun 2024, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan produksi padi dan jagung terbesar kedua di Indonesia dengan produksi padi mencapai 8,89 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi jagung mencapai 2,43 juta ton. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025). Kontribusinya dalam menjaga pasokan pangan di tingkat regional maupun nasional sangatlah signifikan. Namun, di balik peran strategis ini, Jawa Tengah juga menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengancam ketahanan pangan. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan yang lebih besar, sementara di sisi lain, terjadi penurunan luas lahan pertanian produktif. Isu demografi petani yang didominasi oleh generasi tua, dengan minimnya regenerasi dari kalangan milenial dan Gen Z, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Selain

itu, fluktuasi harga komoditas pangan yang tidak stabil, serta masih adanya daerah-daerah yang rentan pangan dan kasus stunting, semakin menambah kompleksitas persoalan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Prov. Jateng) hadir sebagai institusi pemerintah yang memiliki amanat dan tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan program, dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Dishanpan Prov. Jateng ini secara jelas diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan landasan hukum terbaru bagi operasional dinas. Setiap program yang dijalankan oleh Dishanpan Prov. Jateng, mulai dari upaya peningkatan diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan, hingga pengawasan keamanan pangan, memerlukan alokasi anggaran yang substansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dishanpan Prov. Jateng menunjukkan skala pengelolaan dana yang signifikan selama periode penelitian:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dishanpan Prov. Jateng

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2022	43.528.909.000	41.632.036.996	95,64
2023	66.480.947.000	65.212.771.395	98,09
2024	39.805.906.000	38.747.206.024	97,34

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2022 hingga tahun 2024 atas besaran dana yang dikelola konsisten tinggi, di atas 95% setiap tahunnya. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini, meskipun secara finansial menunjukkan kinerja yang baik, tidak otomatis mencerminkan kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, bisa saja dicapai dengan penggunaan anggaran yang tidak efisien, atau pencapaian target kegiatan yang kurang maksimal. Inilah yang menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan peraturan dan realita pelaksanaan di lapangan. Di sinilah Konsep *Value for Money* (VfM) menjadi sangat relevan dan penting.

Konsep VfM merupakan sebuah pendekatan sistematis yang membantu dalam menilai seberapa baik Dishanpan Prov. Jateng telah mengelola sumber dayanya. Konsep ini melihat dari tiga sudut pandang utama antara lain: (1) ekonomis (hemat), yaitu sejauh mana input diperoleh dengan biaya yang wajar; (2) efisiensi (berdaya guna), yaitu perbandingan optimal antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan; dan (3) efektivitas (berhasil guna), yaitu sejauh mana sejauh mana realisasi kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan VfM memungkinkan identifikasi area pemberoran, inefisiensi proses, atau program yang belum memberikan hasil optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Dishanpan Prov. Jateng.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa konsep VfM ini sangat berguna dan relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan di berbagai instansi pemerintah daerah. Studi oleh Susi Maryanti dan Agus Munandar (2021)

dengan judul *Analisis Value for Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019* menunjukkan bagaimana VfM digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, menyimpulkan tingkat ekonomis rata-rata sebesar 87,74%, Tingkat efisiensi rata-rata sebesar 101,18% dan tingkat efektivitas rata-rata 100,88%. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi dan Pipiet Niken Aurelia (2023) dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka* memberikan hasil bahwa kinerja keuangan BPKAD Kab. Sikka dinilai ekonomis dan efisien, namun tidak efektif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tomi Hardiansyah (2024) dengan judul *Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021* dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut, kinerja keuangan Pemkab Sleman dinilai cukup ekonomis, efisien dan sangat efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, konsep *Value for Money* telah banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan di sektor publik. Namun demikian, masih jarang ditemukan penelitian yang mengkaji kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money* secara simultan dengan mengintegrasikan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat pemerintah daerah secara umum, tanpa melihat keterkaitan langsung antara efisiensi penggunaan anggaran dengan

capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dilaporkan dalam LKjIP. Kondisi ini menimbulkan celah penelitian (*research gap*), yaitu perlunya analisis yang tidak hanya menilai sejauh mana anggaran direalisasikan, tetapi juga mengaitkannya dengan hasil dan manfaat nyata program ketahanan pangan yang dijalankan oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada aspek penggunaan dua sumber data resmi pemerintah (LRA dan LKjIP) untuk menilai kinerja keuangan dari tiga dimensi *Value for Money* yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara terintegrasi. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada instansi teknis bidang ketahanan pangan, yang memiliki karakteristik kinerja berbeda dibandingkan dinas sektor ekonomi atau pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam memperkuat pengukuran kinerja keuangan berbasis akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat ekonomis pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 berdasarkan konsep *Value for Money*?
- 2) Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 berdasarkan konsep *Value for Money*?

- 3) Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 berdasarkan konsep *Value for Money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tingkat ekonomis pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan konsep *Value for Money*.
- 2) Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan konsep *Value for Money*.
- 3) Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan konsep *Value for Money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Manfaat teoritis
 - (1) Pengembangan Konsep *Value for Money*: Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai penerapan konsep *Value for Money* di sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintah daerah yang bergerak di bidang ketahanan pangan.

(2) Kontribusi pada Ilmu Manajemen Publik: Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian dalam bidang manajemen publik, khususnya terkait pengukuran kinerja dan akuntabilitas keuangan dan manajemen strategis pemerintah daerah.

(3) Dasar Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kinerja keuangan organisasi perangkat daerah.

2) Manfaat Praktis

(1) Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah:

- a) Memberikan gambaran objektif mengenai kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dinas selama periode 2022-2024.
- b) Mengidentifikasi area-area spesifik yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian target kinerja.
- c) Mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

(2) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a) Memberikan gambaran obyektif mengenai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan anggaran.

b) Membantu pemerintah daerah menilai sejauh mana pengelolaan keuangan telah sesuai dengan prinsip Value for Money sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Bagi Masyarakat:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

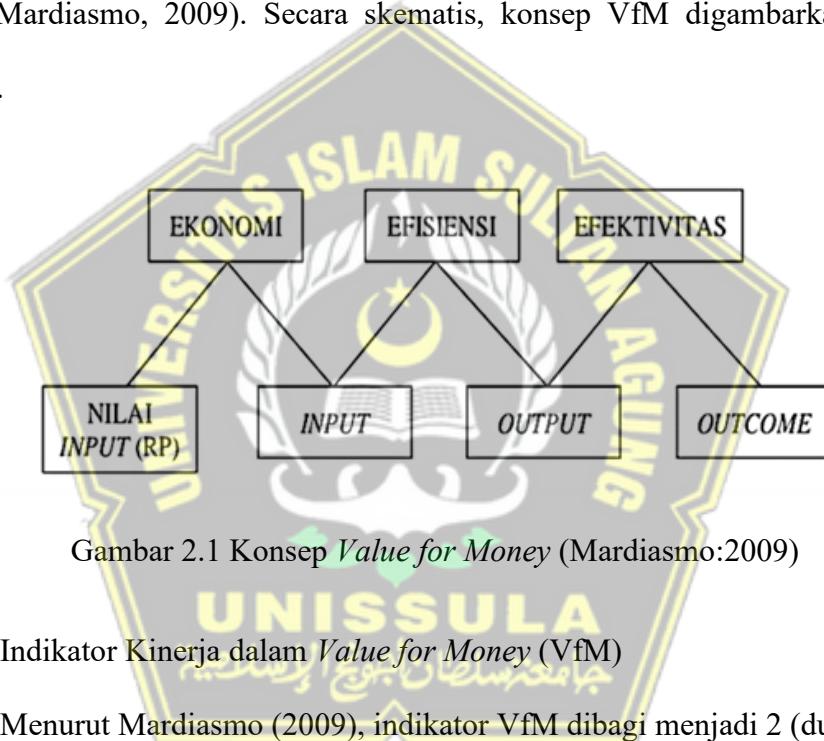
2.1.1 Kinerja Keuangan Sektor Publik

Kinerja keuangan sektor publik merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan suatu entitas pemerintah dalam mengelola sumber daya finansial atau keuangannya secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan sektor publik tidak hanya dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga sejauh mana pengelolaan anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.

Di Indonesia, kinerja keuangan sektor publik diukur melalui laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Salah satu laporan utamanya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain melalui LRA, kinerja keuangan sektor publik juga diukur melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan pemerintah.

2.1.2 Konsep *Value for Money* (VfM)

Konsep *Value for Money* (VfM) adalah sebuah konsep evaluasi kinerja yang komprehensif dalam sektor publik, yang bertujuan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi telah menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Konsep VfM didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama yang saling terkait, yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, sering disebut sebagai "3E" (Mardiasmo, 2009). Secara skematis, konsep VfM digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Konsep *Value for Money* (Mardiasmo:2009)

1) Indikator Kinerja dalam *Value for Money* (VfM)

Menurut Mardiasmo (2009), indikator VfM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Alokasi biaya

Indikator ini terdiri atas indikator ekonomi dan efisiensi. Ekonomis diartikan bahwa pembelian barang dan/atau jasa dengan kualitas terbaik pada harga yang minimal (*spending less*). Efisiensi diartikan bahwa pencapaian output dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*)

(2) Kualitas pelayanan

Indikator kualitas pelayanan adalah indikator efektivitas. Efektivitas berarti bahwa dalam mencapai tujuan, sasaran dan manfaat organisasi melibatkan kontribusi dari *output*.

2) Langkah-langkah Pengukuran *Value for Money* (VfM)

Langkah-langkah pengukuran VfM yakni sebagai berikut:

(1) Ekonomi

Ekonomi dalam konsep VfM mengacu pada praktik perolehan input sumber daya seperti barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai pada harga yang terendah. Ini adalah tentang "*spending less*" atau penghematan dalam pengadaan. Suatu organisasi dikatakan ekonomis apabila mampu meminimalkan biaya input yang digunakan tanpa mengurangi kualitas yang dibutuhkan, serta menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Ardila & Putri, 2015). Dalam manajemen, prinsip ekonomi ini merupakan fondasi efisiensi biaya. Menurut Mahmudi (2019), rasio ekonomis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Input Rencana: Jumlah Anggaran Belanja
- b) Input Realisasi: Jumlah Realisasi Belanja

Kriteria penilaian kinerja ekonomis adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio ekonomi $> 100\%$ berarti ekonomis
- b) Jika rasio ekonomi 85 s.d. 100% berarti cukup ekonomis
- c) Jika rasio ekonomi 65 s.d. 84% berarti kurang ekonomis
- d) Jika rasio ekonomi $< 65\%$ berarti tidak ekonomis

(2) Efisiensi

Efisiensi dalam konsep VfM adalah tentang "*spending well*," yaitu kemampuan organisasi untuk mencapai output maksimum dengan input serendah-rendahnya (Mahmudi, 2019). Efisiensi berfokus pada hubungan antara *input* dan *output*. Dari sudut pandang manajemen operasional, efisiensi mengukur seberapa baik proses internal dikelola untuk menghasilkan output yang diinginkan. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan (kinerja fisik/capaian output) dengan input yang digunakan (anggaran belanja).

Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Nilai Kinerja Output: Persentase Capaian Output
- b) Nilai Kinerja Input: Persentase Capaian Anggaran Belanja

Kriteria penilaian kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio efisiensi $< 90\%$ berarti sangat efisien

- b) Jika rasio efisiensi 90 s.d. 99% berarti efisien
- c) Jika rasio efisiensi = 100% berarti cukup efisiens
- d) Jika rasio efisiensi > 100% berarti tidak efisien

(3) Efektivitas

Efektivitas dalam konsep VfM adalah elemen yang berfokus pada "*spending wisely*". Ini menilai sejauh mana output yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019). Dalam manajemen strategis, efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misi, visi dan tujuannya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi sasaran atau tujuan dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Nilai Kinerja Outcome: Persentase Realisasi Indikator Kinerja
- b) Nilai Kinerja Output: Persentase Target Indikator Kinerja

Kriteria penilaian kinerja efektivitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio efektivitas $\geq 100\%$ berarti efektif
- b) Jika rasio efektivitas 85 s.d. 99% berarti cukup efektif
- c) Jika rasio efektivitas 65 s.d. 84% berarti kurang efektif
- d) Jika rasio efektivitas $< 65\%$ berarti sangat tidak efektif

2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dibandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode pelaporan tertentu.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, informasi yang tersaji pada LRA bermanfaat bagi para pihak yang menggunakan laporan dalam mengevaluasi kinerja keuangan serta kepatuhan organisasi dalam menyediakan informasi pengelolaan sumber daya ekonomi serta informasi mengenai realisasi anggaran secara keseluruhan guna mengevaluasi kinerja organisasi dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu LRA dapat menyediakan informasi kepada pihak pengguna laporan mengenai bagaimana perolehan dan penggunaan dana itu telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

LKjIP Adalah dokumen akuntabilitas yang menyajikan hasil capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan tingkat realisasinya. Laporan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

2.1.5 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah atau disingkat Dishanpan Prov. Jateng merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dishanpan Prov. Jateng mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan. Adapun fungsi yang dijalankan meliputi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; dan

- 4) Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

Struktur organisasi Dishanpan Prov. Jateng mencerminkan pembagian tugas yang terstruktur sesuai dengan focus kerja masing-masing bidang. Secara umum, unit kerja pada Dishanpan Prov. Jateng terdiri atas:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
- 3) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- 4) Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- 5) Bidang Keamanan Pangan
- 6) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Setiap bidang menjalankan fungsi teknis yang meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan berdasarkan tugas pokok yang telah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah yang menerapkan konsep *Value for Money* dapat diringkas sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul/ Fokus Penelitian	Obyek Penelitian	Metode Penelitian	Temuan / Relevansi
Maryanti & Munandar (2021)	Analisis <i>Value for Money</i> untuk Mengukur Kinerja Keuangan	Pemerintah Kota Surabaya	Kuantitatif Deskriptif	Kinerja keuangan Pemkot Surabaya ekonomis dan efektif, namun kurang efisien.
Wakhid Yulianto, Sri Wahyuningsih, Rizki Kurniasih & Ari Waluyo (2023)	Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “ <i>Value for Money</i> ” pada Pelaksanaan Anggaran	Dinas “X” di Sektor Publik	Kuantitatif Deskriptif	Pelaksanaan anggaran dinilai ekonomis dan efektif tetapi efisiensi belum optimal.
Adriana Alsandra Da Cunha, Henrikus Herdi & Pipiet Niken Aurelia (2023)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode <i>Value for Money</i>	BPKAD Kabupaten Sikka	Deskriptif Kuantitatif	Menunjukkan tingginya capaian realisasi belum tentu merepresentasikan Tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari kinerja keuangan pemerintah
Polii, Saerang, & Tangkuman (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep <i>Value for Money</i>	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kuantitatif Deskriptif	Pemprov Sulut dinilai ekonomis dan efektif, tetapi tidak efisien.
Subhan Purwadinata, Ismawati & Nur Elmiati (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip <i>Value for Money</i>	APBD Kabupaten Sumbawa	Deskriptif Kuantitatif	Menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2018 belum memenuhi kriteria <i>value for money</i>

Isna Ardila & Ayu Anindya Putri (2015)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan <i>Value for Money</i>	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Kuantitatif Deskriptif	Hasil pengukuran kinerja keuangan tahun 2010-2013 adalah tidak ekonomis dan tidak efisien namun efektif
Marisa S.B Seran (2021)	Value For Money: Analysis of the Impact of Village Government Performance on Village Financial Management	Desa Subun Bestobe	Kuantitatif	Hasil pengukuran menunjukkan rasio Ekonomis >100% (ekonomis) dan efisiensi >100% (tidak efisien)
Tomi Herdiansyah (2024)	Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan	Pemerintah Kabupaten Sleman	Deskriptif Kuantitatif	Rasio Ekonomi cukup ekonomis (80 – 90%), efisien dengan tingkat (90 – 100%) dan memiliki outcome sangat efektif (> 100%)
Aldi Wiraguna, Yohanes Joni Pambelum & Golda Belladonna Umbing (2024)	Analisis <i>Value for Money</i> Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun	Deskriptif Kuantitatif	Menunjukkan efisiensi dan keekonomian sesuai standar, namun efektivitas perlu perhatian penuh

2.3 Posisi Hipotesis dalam Penelitian

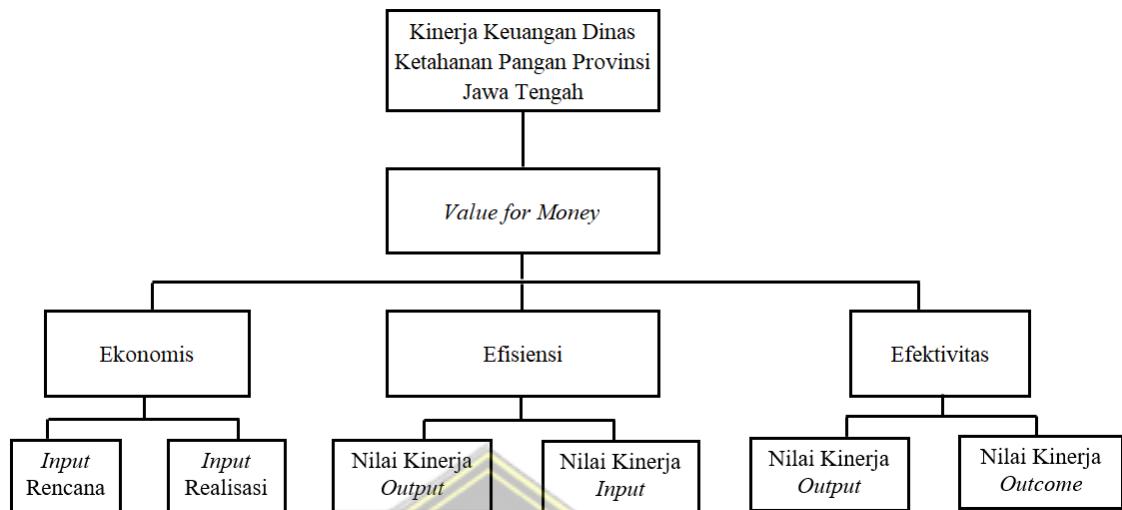
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep *Value for Money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, fokus utama dari penelitian ini adalah

menjawab pertanyaan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan menguji hubungan sebab-akibat antar variabel atau memprediksi hasil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hipotesis formal tidak dirumuskan. Sebagai gantinya, rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab I berfungsi sebagai pernyataan panduan utama yang akan dijawab melalui analisis data. Setiap rumusan masalah akan dieksplorasi dan dijawab secara komprehensif berdasarkan data-data yang berasal dari laporan keuangan yakni LRA dan laporan kinerja yakni LKjIP Dishanpan Prov. Jateng pada Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan alur analisis yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang diukur menggunakan tiga indikator *Value for Money* yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas melalui pemanfaatan data yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan kinerja teraudit milik Dishanpan Prov. Jateng pada Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.

Berdasarkan kajian pustaka dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2022) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sementara itu, penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2022) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen, serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian deskriptif kuantitatif di sini bertujuan untuk:

- 1) Menggambarkan kondisi kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.
- 2) Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator dari konsep *Value for Money* (ekonomis, efisiensi, efektivitas).
- 3) Menyajikan hasil analisis secara numerik disertai penjelasan sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan keuangan di masa depan.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kuantitatif digunakan karena penelitian yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis kausalitas,

tetapi lebih kepada analisis capaian kinerja keuangan berdasarkan data realisasi anggaran yang telah tersedia dan teraudit oleh Inspektorat dan BPK sehingga informasi yang tersaji dapat dipastikan kebenarannya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2022) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dokumen laporan yang mencakup data anggaran dan realisasi belanja serta capaian kinerja dinas.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2022). Sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu mewakili populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yang ditujukan untuk memperoleh sampel yang mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan (kriteria) tertentu atau seleksi khusus

(Sugiyono, 2022). Kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang.
- 2) Data mencakup komponen anggaran dan realisasi belanja serta capaian kinerja dinas sehingga dapat dianalisis dengan indikator *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- 3) Tahun 2022 s.d. 2024 dipilih karena menggambarkan kondisi keuangan terkini pasca pandemi COVID-19 serta masa awal penerapan kebijakan pembangunan pangan berkelanjutan.

Dengan kriteria-kriteria pemilihan tersebut, data yang digunakan relevan dengan fokus penelitian yaitu analisis kinerja keuangan berbasis *Value for Money*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber utama dalam pengumpulan informasi. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data dimana data tersebut tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Pemilihan data sekunder sebagai sumber utama dimaksudkan untuk memperoleh informasi faktual dan historis mengenai kebijakan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan di instansi yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2022), metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan maupun suatu keterangan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 s.d. 2024 serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023).

Metode dokumentasi dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui survei atau wawancara, tetapi fokus pada data resmi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya pada instansi yang diteliti.

3.5 Variabel dan Indikator Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel utamanya adalah Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang diukur menggunakan indikator dari konsep *Value for Money* (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas).

3.5.1 Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Prov. Jateng) merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Instansi pemerintah atau dalam hal ini adalah Dishanpan Prov. Jateng, dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila dalam pengelolaan keuangan dinas tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.5.2 Ekonomis

Ekonomis dalam konsep VfM mengacu pada praktik perolehan input sumber daya seperti barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai pada harga yang terendah. Ini adalah tentang "*spending less*" atau penghematan dalam pengadaan. Suatu organisasi dikatakan ekonomis apabila mampu melaksanakan kegiatan dengan menggunakan biaya serendah mungkin, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik. Dalam manajemen, prinsip ekonomi ini merupakan fondasi efisiensi biaya. Menurut Mahmudi (2019), rasio ekonomis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Input Rencana: Jumlah Anggaran Belanja
- 2) Input Realisasi: Jumlah Realisasi Belanja

Kriteria penilaian kinerja ekonomis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika rasio ekonomi > 100% berarti ekonomis

- 2) Jika rasio ekonomi 85 s.d. 100% berarti cukup ekonomis
- 3) Jika rasio ekonomi 65 s.d. 84% berarti kurang ekonomis
- 4) Jika rasio ekonomi < 65% berarti tidak ekonomis

3.5.3 Efisiensi

Efisiensi dalam konsep VfM adalah tentang "spending well," yaitu kemampuan organisasi untuk mencapai output maksimum dengan input serendah-rendahnya (Mahmudi, 2019). Efisiensi berfokus pada hubungan antara *input* dan *output*. Dari sudut pandang manajemen operasional, efisiensi mengukur seberapa baik proses internal dikelola untuk menghasilkan *output* yang diinginkan. Instansi pemerintah dikatakan efisien apabila mampu menghadilkan *output* yang maksimal dengan menggunakan *input* yang minimal. Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Nilai Kinerja Output: Persentase Capaian Output
- 2) Nilai Kinerja Input: Persentase Capaian Anggaran Belanja

Kriteria penilaian kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika rasio efisiensi < 90% berarti sangat efisien
- 2) Jika rasio efisiensi 90 s.d. 99% berarti efisien
- 3) Jika rasio efisiensi = 100% berarti cukup efisien
- 4) Jika rasio efisiensi > 100% berarti tidak efisien

3.5.4 Efektivitas

Efektivitas dalam konsep VfM adalah elemen yang berfokus pada "spending wisely". Ini menilai sejauh mana output yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019). Dalam manajemen strategis, efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misi, visi dan tujuannya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi sasaran atau tujuan dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Nilai Kinerja Outcome: Persentase Realisasi Indikator Kinerja
- 2) Nilai Kinerja Output: Persentase Target Indikator Kinerja

Kriteria penilaian kinerja efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika rasio efektivitas $\geq 100\%$ berarti efektif
- 2) Jika rasio efektivitas 85 s.d. 99% berarti cukup efektif
- 3) Jika rasio efektivitas 65 s.d. 84% berarti kurang efektif
- 4) Jika rasio efektivitas $< 65\%$ berarti sangat tidak efektif

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengolah, menghitung dan

mendeskripsikan data angka yang diperoleh dari laporan keuangan terutama data anggaran dan belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data capaian kinerja *output* dan *outcome* yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis menggunakan data numerik, tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian akan menunjukkan gambaran objektif mengenai kondisi kinerja keuangan instansi berdasarkan data yang ada. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan *Value for Money* (VfM) yang terdiri dari tiga indikator utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2019).

3.6.1 Langkah-langkah Analisis Data

1) Pengumpulan dan Pengelompokan Data

- (1) Menghimpun data sekunder berupa data angka yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
- (2) Data LRA digunakan untuk memperoleh angka anggaran belanja dan angka realisasi anggaran belanja yang akan digunakan untuk menentukan tingkat ekonomis dan efisiensi kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian.
- (3) Data LKjIP digunakan untuk memperoleh capaian *output* program/kegiatan dan capaian *outcome* atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditentukan. Data yang diperoleh dari LKjIP kemudian digunakan untuk mengetahui Tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian.

2) Pengolahan Data

- (1) Menyusun tabel ringkasan anggaran dan realisasi belanja dari LRA per tahun 2022, 2023 dan 2024.
- (2) Menyusun tabel capaian *output* dan *outcome* per program/kegiatan dari LKjIP per tahun 2022, 2023 dan 2024.
- (3) Mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan perhitungan indikator *value for money* yakni 3E (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas).

3) Perhitungan Indikator *Value for Money*

- (1) Ekonomis

$$\boxed{Rasio Ekonomis = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%}$$

- (2) Efisiensi

$$\boxed{Rasio Efisiensi = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%}$$

- (3) Efektivitas

$$\boxed{Rasio Efektivitas = \frac{\text{Nilai Kinerja Outcome}}{\text{Nilai Kinerja Output}} \times 100\%}$$

4) Interpretasi Hasil

Hasil perhitungan atas indikator *value for money* disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaianya, antara lain sebagai berikut:

(1) Ekonomis

Jika rasio ekonomi $> 100\%$ berarti ekonomis

Jika rasio ekonomi 85 s.d. 100% berarti cukup ekonomis

Jika rasio ekonomi 65 s.d. 84% berarti kurang ekonomis

Jika rasio ekonomi $< 65\%$ berarti tidak ekonomis

(2) Efisiensi

Jika rasio efisiensi $< 90\%$ berarti sangat efisien

Jika rasio efisiensi 90 s.d. 99% berarti efisien

Jika rasio efisiensi = 100% berarti cukup efisien

Jika rasio efisiensi $> 100\%$ berarti tidak efisien

(3) Efektivitas

Jika rasio efektivitas $\geq 100\%$ berarti efektif

Jika rasio efektivitas 85 s.d. 99% berarti cukup efektif

Jika rasio efektivitas 65 s.d. 84% berarti kurang efektif

Jika rasio efektivitas $< 65\%$ berarti sangat tidak efektif

5) Analisis Tren

Hasil analisis dari indikator *value for money* pada setiap tahun (2022, 2023, 2024) kemudian dibandingkan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan apakah kinerja keuangan semakin membaik, stagnan, atau menurun. Dengan adanya analisis tren ini, akan membantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan

dalam menentukan area mana yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar mendukung tercapainya *good governance*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan di tingkat provinsi. Dinas ini menjadi ujung tombak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi masyarakat.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dishanpan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dishanpan Jateng merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif, Dishanpan Jateng beralamat di Jl. Gatot Subroto, Komplek Pertanian Tarubudaya, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dinas ini menjadi pusat koordinasi program dan kebijakan terkait pengelolaan ketahanan pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah, yang mencakup 29 kabupaten dan 6 kota. Dinas ini bekerja sama dengan perangkat daerah kabupaten/kota, lembaga vertikal

pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha pangan, serta masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Adapun tujuan utama pembentukan Dishanpan adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang cukup dan merata bagi seluruh penduduk Jawa Tengah.
- 2) Meningkatkan stabilitas harga pangan pokok.
- 3) Menjaga mutu dan keamanan pangan.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi, seimbang, dan beragam.
- 5) Mengembangkan sistem cadangan pangan daerah untuk menghadapi krisis atau bencana.

Dengan demikian, keberadaan Dishanpan Jateng menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional, terutama pada aspek ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaras dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dishanpan Jateng menetapkan misi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas;
- 4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsive;
- 5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan
- 6) Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Misi-misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. IKU yang ditetapkan mencakup

indikator bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan pangan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk “Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

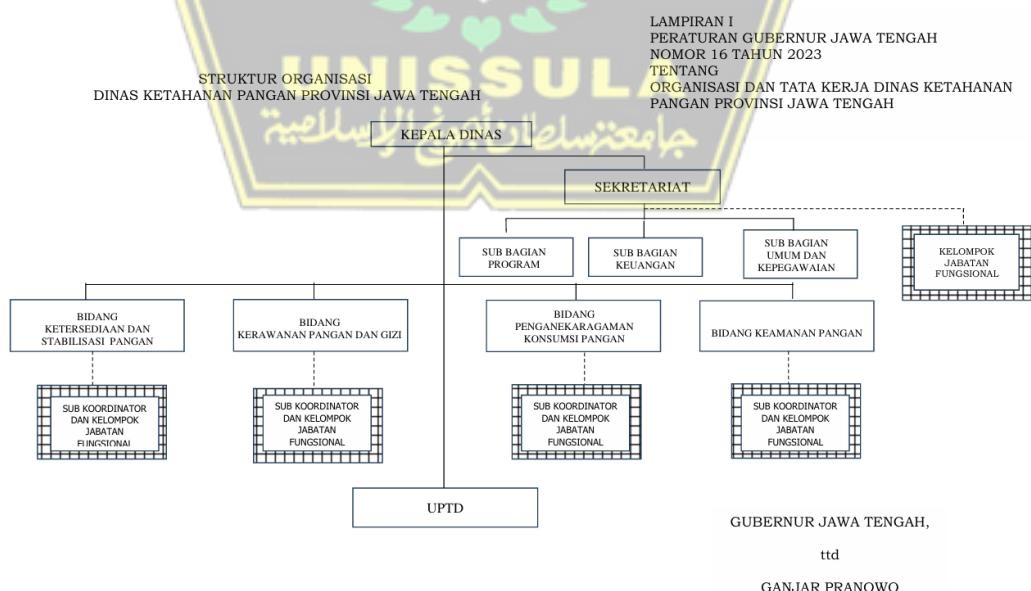
- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- 4) Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Dishanpan Jateng diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi di lingkungan Dishanpan, yang berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dishanpan Jateng

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), susunan organisasi Dishanpan Jateng terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- 4) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- 5) Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 6) Bidang Keamanan Pangan; dan
- 7) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Struktur organisasi ini bersifat fungsional dan hierarkis, di mana masing-masing unsur memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang saling terintegrasi untuk mendukung tujuan utama yaitu “Terwujudnya sistem ketahanan pangan daerah yang kuat, stabil, aman, dan berkelanjutan.”

Berikut uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi:

- 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas utama Kepala Dinas meliputi

- (1) Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan;

- (2) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- (3) Menjamin pelaksanaan program strategis sesuai indikator kinerja utama (IKU) provinsi;
- (4) Melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kinerja seluruh bidang dan sekretariat;
- (5) Menjalin koordinasi dan kemitraan lintas sektor dengan instansi pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga nonpemerintah.

Kepala Dinas berperan sebagai *decision maker* strategis yang memastikan bahwa kebijakan pangan daerah sesuai dengan kebijakan nasional, serta mengarah pada pemenuhan prinsip *Value for Money* (ekonomis, efisien, dan efektif).

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Tugas Sekretaris meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- (3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- (5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- (6) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (7) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- (8) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 10 Pergub Jateng 16/2023, Sekretariat terdiri atas tiga subbagian, yaitu:

- (1) Subbagian Program

Subbagian Program bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Program.Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
- g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
- h) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Keuangan. Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- c) menyiapkan bahan pengordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
- g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
- h) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian. Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c) menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas
 - i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - k) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau disingkat Bidang KSP dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Bidang KSP bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan.

4) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi atau disingkat Bidang KPG dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang KPG bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.

5) Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan atau disingkat Bidang PKP dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang PKP bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal, Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, Bidang Promosi Panganekaragaman Pangan.

6) Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Pangan bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama Keamanan Pangan.

7) Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan atau disingkat BPMKP merupakan unsur pelaksana teknis penunjang tertentu di bidang Mutu dan Keamanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BPMKP Bertugas untuk melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

4.2 Data Laporan Keuangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024

Bagian ini menjelaskan data keuangan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) yang digunakan sebagai dasar dalam analisis *Value for Money* (VfM), yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dishanpan Jateng tahun 2022, 2023, dan 2024.

Kedua laporan tersebut merupakan dokumen akuntabilitas resmi yang menggambarkan perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta tingkat capaian sasaran kinerja organisasi. Data LRA mencerminkan sejauh mana anggaran digunakan secara ekonomis, sedangkan LKjIP

menampilkan capaian indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di Dishanpan Jateng.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan hubungan antara input rencana (anggaran yang ditetapkan) dan input realisasi (realisasi belanja) dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan dokumen LRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perkembangan anggaran dan realisasi belanja selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data LRA Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2022	43.528.909.000	41.632.036.996	95,64
2023	66.480.947.000	65.212.771.395	98,09
2024	39.805.906.000	38.747.206.024	97,34

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas, persentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi yang selalu di atas 95%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal.

Pada tahun 2022, tingkat realisasi mencapai 95,64%, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar. Hal ini

menggambarkan kinerja yang ekonomis karena penggunaan dana sedikit lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 98,09%, yang berarti pelaksanaan kegiatan berjalan hampir sempurna sesuai rencana. Kenaikan ini juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja pada aspek pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam LKjIP.

Sedangkan pada tahun 2024, meskipun jumlah anggaran menurun dari tahun sebelumnya, realisasi mencapai 97,34%, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Data ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dinas telah memenuhi prinsip ekonomis dalam konsep *Value for Money*.

4.2.2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang memuat capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. LKjIP disusun untuk menilai sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) berhasil mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direncanakan.

Data capaian kinerja dalam LKjIP ini menjadi dasar penting dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjadi bagian integral dalam analisis *Value for Money*.

Berdasarkan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2024, diperoleh ringkasan capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dishanpan Jateng Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Skor PPH Konsumsi	88,44	94,4	106,74
2022	Nilai SKM	78,00	89,50	114,74
2023	Skor PPH Konsumsi	88,80	94,20	106,08
2023	Nilai SKM	76,00	91,50	120,39
2024	Indeks Ketahanan Pangan	83,00	85,34	102,81
2024	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	91,00	110,97

Berdasarkan data dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa:

1) Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 106,74%, yang berarti target konsumsi pangan masyarakat telah terlampaui. Hal ini

mencerminkan keberhasilan program peningkatan kualitas konsumsi pangan dan keberlanjutan ketersediaan bahan pangan pokok.

Selain itu, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 114,74%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik Dishanpan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan pelayanan terutama dalam bidang informasi ketahanan pangan dan layanan pengawasan keamanan pangan berjalan sangat efektif.

2) Tahun 2023

Pada tahun 2023 ini menjadi periode dengan peningkatan kinerja paling menonjol. Skor PPH Konsumsi tercatat 106,08%, mempertahankan tren capaian di atas target. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

Sementara itu, Nilai SKM mencapai 120,39%, merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun penelitian. Angka ini menggambarkan keberhasilan Dinas dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor ketahanan pangan. Capaian yang tinggi ini erat kaitannya dengan inovasi pelayanan digital, peningkatan koordinasi lintas bidang, dan optimalisasi pengawasan mutu pangan di tingkat kabupaten/kota.

3) Tahun 2024

Pada tahun 2024, fokus capaian kinerja Dishanpan bergeser pada indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Ketahanan Pangan mencapai 102,81%, menunjukkan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Jawa Tengah, baik dari aspek ketersediaan, akses, maupun konsumsi pangan masyarakat.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 110,97%, menandakan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pelayanan di Dishanpan telah memberikan hasil nyata terhadap penerima manfaat.

Peningkatan ini juga sejalan dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif, mencerminkan semakin kuatnya komitmen dinas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik.

4.2.3 Keterkaitan LRA dan LKjIP dalam Analisis Value for Money

Analisis *Value for Money* (VfM) pada penelitian ini mengintegrasikan dua aspek utama pelaporan pemerintah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam

menilai keberhasilan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di sektor publik.

1) Aspek Ekonomi (LRA)

LRA menjadi dasar penilaian ekonomi karena menggambarkan perbandingan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah realisasi belanja. Rasio ini menunjukkan seberapa hemat dan efisien sumber daya fiskal digunakan untuk mendanai program.

2) Aspek Efisiensi (LRA dan LKjIP):

Efisiensi dianalisis dengan membandingkan nilai capaian output yang dilaporkan dalam LKjIP dengan tingkat realisasi anggaran pada LRA. Semakin tinggi rasio antara output terhadap input, semakin efisien pengelolaan program yang dilakukan.

3) Aspek Efektivitas (LKjIP):

Efektivitas diukur berdasarkan perbandingan antara hasil (*outcome*) dan target (*output*). Data capaian indikator dalam LKjIP menunjukkan sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan hasil sesuai sasaran strategis dinas.

Dengan demikian, kombinasi antara data keuangan (LRA) dan data kinerja (LKjIP) memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan berbasis hasil (*performance-based financial management*) dan untuk mengukur sejauh mana prinsip *Value for Money*

telah diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan.

4.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pendekatan *Value for Money* (VfM), yang meliputi tiga indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Analisis ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022–2024.

Pendekatan *Value for Money* digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara hemat (ekonomis), produktif (efisien), dan memberikan hasil maksimal (efektif).

4.3.1 Analisis Ekonomis

Rasio ekonomis mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya anggaran secara hemat, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan.

Menurut Mahmudi (2019), rasio ekonomis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Input Rencana: Jumlah Anggaran Belanja
- b) Input Realisasi: Jumlah Realisasi Belanja

Kriteria penilaian kinerja ekonomis adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio ekonomi > 100% berarti ekonomis
- b) Jika rasio ekonomi 85 s.d. 100% berarti cukup ekonomis
- c) Jika rasio ekonomi 65 s.d. 84% berarti kurang ekonomis
- d) Jika rasio ekonomi < 65% berarti tidak ekonomis

1) Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp43.528.909.000 dengan realisasi sebesar Rp41.632.036.996. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2022} = \frac{43.528.909.000}{41.632.036.996} \times 100\% = 104,55\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2022 tergolong ekonomis, karena rasio melebihi 100%, yakni 104,55%. Hal ini menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng mampu melaksanakan seluruh program dengan penghematan anggaran tanpa menurunkan capaian kinerja.

2) Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp66.480.947.000 dengan realisasi sebesar Rp65.212.771.395. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2023} = \frac{66.480.947.000}{65.212.771.395} \times 100\% = 101,94\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dikatakan ekonomis, karena rasio ekonomis melebihi 100%, yakni 101,94%. Selain itu, diketahui juga bahwa tingkat efisiensi pengeluaran semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan optimalisasi perencanaan belanja pada tahun 2023.

3) Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp39.805.906.000, dengan realisasi sebesar Rp38.747.206.024. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ekonomis tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis}_{2024} = \frac{39.805.906.000}{38.747.206.024} \times 100\% = 102,73\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 juga dikatakan ekonomis, karena rasio ekonomis melebihi 100%, yakni 102,73%. Konsistensi efisiensi pembelanjaan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng memiliki perencanaan dan kontrol keuangan yang baik.

4.3.2 Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai hubungan antara *input* (penggunaan anggaran) dan *output* (capaian program). Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%}$$

Keterangan:

- a) Nilai Kinerja *Output*: Persentase Capaian Output
- b) Nilai Kinerja *Input*: Persentase Capaian Anggaran Belanja

Kriteria penilaian kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio efisiensi < 90% berarti sangat efisien
- b) Jika rasio efisiensi 90 s.d. 99% berarti efisien
- c) Jika rasio efisiensi = 100% berarti cukup efisien
- d) Jika rasio efisiensi > 100% berarti tidak efisien

1) Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2022, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 110,74%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 95,64%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2022} = \frac{110,74\%}{95,64\%} \times 100\% = 115,81\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan kinerja tahun 2022 tergolong tidak efisien,

karena rasio melebihi 100%, yakni 115,81%. Meskipun *output* atau kinerja pada tahun tersebut sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi penggunaan anggaran.

2) Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2023, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 113,24%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 98,09%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2023} = \frac{113,24\%}{98,09\%} \times 100\% = 115,44\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui rasio efisiensi pada tahun 2023 adalah 115,44%. Hasil ini menunjukkan tidak efisien karena rasio tersebut melebihi 100%, meskipun capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya. Faktor pendorongnya berasal dari peningkatan beban kegiatan dan biaya program yang tinggi di tengah realisasi output yang maksimal.

3) Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2024, nilai capaian *output* (rata-rata capaian kinerja) adalah 106,89%. Kemudian, pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai capaian *input* (realisasi anggaran) adalah 97,34%. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efisiensi pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi}_{2024} = \frac{106,89\%}{97,34\%} \times 100\% = 109,81\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, hasilnya menunjukkan kondisi tidak efisien karena melebihi 100%, yakni 109,81%. Meskipun kinerja tahun 2024 cukup baik, terdapat indikasi bahwa peningkatan hasil belum proporsional dengan penggunaan sumber daya anggaran, sehingga efektivitas tinggi tidak selalu sejalan dengan efisiensi keuangan.

4.3.3 Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana hasil yang dicapai Dishanpan Jateng (*outcome*) sesuai dengan target yang direncanakan. Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Kinerja } Outcome}{\text{Nilai Kinerja } Output} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Nilai Kinerja *Outcome*: Persentase Realisasi Indikator Kinerja
- b) Nilai Kinerja *Output*: Persentase Target Indikator Kinerja

Kriteria penilaian kinerja efektivitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika rasio efektivitas $\geq 100\%$ berarti efektif
- b) Jika rasio efektivitas 85 s.d. 99% berarti cukup efektif
- c) Jika rasio efektivitas 65 s.d. 84% berarti kurang efektif
- d) Jika rasio efektivitas $< 65\%$ berarti sangat tidak efektif

1) Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2022 sebesar 91,95 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 83,22. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2022} = \frac{91,95}{83,22} \times 100\% = 110,49\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 kinerja Dishanpan Jateng dikatakan efektif karena capaian realisasi (*outcome*) melampaui target (*output*) yang telah ditetapkan sehingga rasio efektivitasnya menunjukkan angka di atas 100%, yakni 110,49%.

2) Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2023 sebesar 92,85 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 82,4. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2023} = \frac{92,85}{82,40} \times 100\% = 112,68\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2023 mencapai 112,68%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang efektif di tahun tersebut dan bahkan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Dishanpan Jateng berhasil melaksanakan program secara optimal dengan hasil yang nyata bagi masyarakat.

3) Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Dishanpan Jateng pada tahun 2024 sebesar 88,17 dan rata-rata target indikator kinerja sebesar 82,5. Dengan demikian, dapat dihitung rasio efektivitas pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2023} = \frac{88,17}{82,50} \times 100\% = 106,87\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2024 mencapai 106,87%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2024 tergolong efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi tujuan strategis dan peningkatan pelayanan public tetap terjaga meski terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran pada tahun tersebut.

4.3.4 Kesimpulan Analisis Data

Berdasarkan hasil perhitungan selama tiga tahun (2022–2024), dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Analisis Data Berdasarkan konsep VfM

Tahun Anggaran	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
2022	Ekonomis (104,55%)	Tidak Efisien (115,81%)	Efektif (110,49%)
2023	Ekonomis (101,94%)	Tidak Efisien (115,44%)	Efektif (112,68%)
2024	Ekonomis (102,73%)	Tidak Efisien (109,81%)	Efektif (106,87%)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2022–2024, pengelolaan keuangan Dishanpan Jateng bersifat

ekonomis dan efektif, namun belum efisien. Artinya, Dishanpan Jateng mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja, tetapi dalam penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal secara biaya.

Hal ini menandakan bahwa terdapat potensi perbaikan dalam manajemen biaya dan alokasi anggaran agar kinerja yang tinggi dapat dicapai dengan tingkat efisiensi yang lebih baik di masa mendatang.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan mengkaji lebih dalam hasil perhitungan kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) berdasarkan konsep *Value for Money* (VfM) yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019).

Konsep *Value for Money* digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode tahun 2022–2024, kinerja keuangan Dishanpan Jateng secara umum sudah ekonomis dan efektif, namun belum efisien. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun anggaran dapat digunakan secara hemat dan hasil kinerja telah mencapai bahkan melampaui target, penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal dibandingkan hasil yang diperoleh.

4.4.1 Pembahasan Aspek Ekonomis

Aspek ekonomis berfokus pada bagaimana Dishanpan Jateng mengelola anggaran untuk menghasilkan *output* yang diharapkan dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis pada Bab 4.3, diperoleh nilai sebagai berikut:

- 1) Tahun 2022: 104,55% (ekonomis)
- 2) Tahun 2023: 101,94% (ekonomis)
- 3) Tahun 2024: 102,73% (ekonomis)

Ketiga tahun tersebut menunjukkan rasio ekonomis di atas 100%, yang berarti bahwa pelaksanaan program Dishanpan Jateng dilakukan secara ekonomis. Anggaran yang telah direncanakan mampu direalisasikan dengan penghematan tanpa menurunkan kualitas hasil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng berhasil melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran dengan baik. Hal ini tercermin dari konsistensi antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi penggunaannya, serta tidak adanya pemborosan dalam belanja kegiatan.

Selain itu, hasil ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Secara teoritis, hasil ini juga mendukung pandangan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa suatu instansi dikatakan ekonomis apabila dapat memperoleh input dengan harga serendah mungkin, tanpa menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, 2023 dan 2024, Dishanpan Jateng telah menunjukkan praktik pengelolaan anggaran yang ekonomis dan berorientasi pada efisiensi penggunaan dana publik.

4.4.2 Pembahasan Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi mengukur sejauh mana Dishanpan Jateng mampu menghasilkan *output* yang optimal dibandingkan dengan *input* yang digunakan. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa seluruh periode penelitian tergolong tidak efisien, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2022: 115,81% (tidak efisien)
- 2) Tahun 2023: 115,44% (tidak efisien)
- 3) Tahun 2024: 109,81% (tidak efisien)

Rasio yang melebihi 100% menunjukkan bahwa peningkatan capaian *output* belum diikuti dengan penggunaan *input* yang lebih hemat. Meskipun kinerja *output* meningkat setiap tahunnya, penggunaan anggaran masih relatif tinggi terhadap hasil yang dicapai. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun pengeluaran telah dilakukan dengan cermat, masih terdapat ruang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya pelaksanaan program.

Ketidakefisienan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Variasi biaya kegiatan antarprogram, terutama pada kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak luas seperti peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan stabilisasi harga bahan pokok.
- 2) Penyesuaian kebijakan daerah terhadap dinamika harga pangan dan prioritas pembangunan, yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan anggaran operasional.
- 3) Keterbatasan dalam inovasi anggaran berbasis kinerja, sehingga masih ditemukan ketidakseimbangan antara alokasi biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Namun demikian, kondisi tidak efisien ini tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk, karena dapat juga disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kelembagaan yang memerlukan tambahan biaya. Hasil ini mendukung temuan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa efisiensi bukan semata soal penghematan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas dan nilai manfaat dari pengeluaran tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dishanpan Jateng telah mencapai hasil kinerja yang baik, optimalisasi efisiensi anggaran masih perlu ditingkatkan, misalnya melalui inovasi perencanaan berbasis hasil (*result-based budgeting*) dan penguatan sistem monitoring kinerja kegiatan.

4.4.3 Pembahasan Aspek Efektivitas

Aspek efektivitas menggambarkan sejauh mana output dan outcome dari kegiatan pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas Dishanpan Jateng pada periode penelitian menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu:

- 1) Tahun 2022: 110,49% (efektif)
- 2) Tahun 2023: 112,68% (efektif)
- 3) Tahun 2024: 106,87% (efektif)

Capaian efektivitas yang melebihi 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang direncanakan. Hasil ini menegaskan bahwa Dishanpan Jateng mampu mewujudkan sasaran kinerja yang diukur melalui indikator utama seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Nilai SKM, Indeks Ketahanan Pangan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian tersebut juga menggambarkan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan dan kepuasan publik di Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antarbidang di Dishanpan Jateng, serta dukungan kebijakan pemerintah provinsi yang konsisten dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Mahmudi (2019) bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana hasil yang dicapai mampu memenuhi target yang ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti Polii (2020) dan Wakhid Yulianto (2023) yang menemukan bahwa instansi pemerintah daerah umumnya telah mampu mencapai efektivitas tinggi meskipun efisiensinya belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dishanpan Jateng selama 2022–2024 sangat efektif, karena capaian program dan indikator kinerja utama secara konsisten melampaui target yang telah ditentukan.

4.4.4 Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh gambaran umum bahwa:

- 1) Aspek ekonomis: menunjukkan bahwa Dishanpan Jateng mampu mengelola anggaran dengan hemat dan terkendali setiap tahun.
- 2) Aspek efisiensi: belum optimal, karena hasil capaian masih memerlukan biaya yang relatif tinggi dibandingkan output yang dihasilkan.
- 3) Aspek efektivitas: menunjukkan hasil yang sangat baik, karena seluruh indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang direncanakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Dishanpan Jateng memiliki tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), dengan keberhasilan utama pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Namun, untuk mencapai *Value for Money* yang ideal, diperlukan strategi peningkatan efisiensi di masa mendatang melalui:

- 1) Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 2) Penguatan evaluasi kegiatan secara periodik dan terstruktur.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi biaya operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip *Value for Money* dengan baik, terutama pada aspek ekonomi dan efektivitas, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek efisiensi agar kinerja keuangan dapat lebih berimbang antara penghematan, produktivitas, dan hasil yang diperoleh di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Dishanpan Jateng) selama tahun 2022–2024 menggunakan pendekatan Value for Money (VfM), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomis

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Dishanpan Jateng selama periode 2022-2024 berada dalam kategori ekonomis, dengan rata-rata rasio di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dishanpan Jateng telah dilakukan secara efisien dari sisi biaya, di mana realisasi belanja dilakukan lebih hemat dari pada rencana tanpa mengurangi kualitas kinerja. Artinya, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2) Aspek Efisiensi

Kinerja efisiensi selama 2022-2024 menunjukkan hasil yang tidak efisien, namun terdapat tren positif menuju perbaikan. Rasio efisiensi yang terus menurun dari 115,81% pada tahun 2022 menjadi 109,82% pada tahun 2024 menandakan bahwa Dishanpan Jateng mulai mampu menekan biaya pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan

pengelolaan sumber daya. Walaupun belum mencapai kondisi ideal, tren ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam memperbaiki proses internal dan tata kelola keuangan.

3) Aspek Efektivitas

Capaian efektivitas menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten tinggi dengan nilai rasio selalu di atas 100% setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa target program dan kegiatan dapat dicapai, bahkan terlampaui. Artinya, pelaksanaan anggaran berhasil menghasilkan *outcome* atau manfaat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, seperti peningkatan ketahanan pangan, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dishanpan Jateng dalam tiga tahun terakhir tergolong ekonomis dan efektif, namun belum sepenuhnya efisien. Meskipun demikian, arah perkembangan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dan mengarah pada pengelolaan keuangan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip *Value for Money*. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta akuntabilitas keuangan yang semakin kuat.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1) Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat teori kinerja keuangan publik berdasarkan konsep *Value for Money* yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), di mana kinerja instansi pemerintah dapat diukur tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan anggaran tersebut menghasilkan manfaat dan capaian kinerja yang optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris tentang implementasi *Value for Money* di sektor pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks dinas ketahanan pangan.

2) Implikasi Praktis

Bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi kinerja keuangan yang objektif dan terukur. Melalui temuan bahwa kinerja sudah ekonomis dan efektif namun belum efisien, Dishanpan Jateng dapat melakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi, seperti optimalisasi perencanaan anggaran, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan koordinasi antarbidang.

Selain itu, bagi pemerintah provinsi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran berbasis kinerja, sehingga pengalokasian sumber daya di masa mendatang lebih berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*) daripada sekadar serapan anggaran.

3) Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kinerja keuangan perangkat daerah dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* secara lebih luas, baik antarinstansi maupun lintas sektor, serta dikombinasikan dengan metode kuantitatif lanjutan seperti analisis regresi atau efisiensi frontier.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk interpretasi hasil dan pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1) Keterbatasan Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) milik Dishanpan Jateng. Data tersebut bersifat agregat, sehingga tidak mencakup rincian per kegiatan atau unit kerja, yang berpotensi menimbulkan penyederhanaan dalam interpretasi kinerja keuangan.

2) Rentang Waktu Penelitian Terbatas

Analisis hanya mencakup periode tiga tahun (2022–2024), sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat menggambarkan kecenderungan jangka panjang atau pengaruh perubahan kebijakan yang lebih luas.

3) Tidak Mengukur Dampak Langsung (*Outcome Social*)

Penelitian ini berfokus pada konsep *Value for Money* di tingkat instansi, sehingga belum menilai dampak langsung terhadap masyarakat seperti perubahan perilaku konsumsi pangan atau peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

4) Tidak Menggunakan Pendekatan Statistik Inferensial

Karena bersifat deskriptif kuantitatif, penelitian ini tidak menguji hubungan antarvariabel melalui uji hipotesis atau analisis regresi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik untuk seluruh perangkat daerah.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan sektor publik, khususnya dalam penerapan konsep *Value for Money* pada instansi pemerintah daerah. Namun, untuk memperdalam dan memperluas hasil temuan yang telah diperoleh, terdapat beberapa agenda penelitian mendatang yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Perluasan Objek dan Periode Penelitian

Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga dapat dibandingkan tingkat penerapan *Value for Money* antarinstansi. Selain itu, memperpanjang periode pengamatan (misalnya lima tahun atau lebih)

akan memberikan gambaran tren kinerja keuangan yang lebih komprehensif dan stabil.

2) Pendekatan Analisis Kuantitatif Lanjutan

Penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif yang lebih mendalam, seperti analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) atau *Stochastic Frontier Analysis* (SFA), guna mengukur efisiensi teknis dan produktivitas secara lebih akurat. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan antarunit kerja.

3) Integrasi dengan Indikator Non-Keuangan

Disarankan untuk mengombinasikan analisis *Value for Money* dengan indikator non-keuangan seperti kepuasan masyarakat, ketahanan pangan rumah tangga, serta inovasi pelayanan publik. Integrasi ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas penggunaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

4) Pendekatan Kualitatif dan *Mixed Method*

Untuk memahami konteks manajerial dan kebijakan yang memengaruhi hasil kinerja, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif (misalnya wawancara mendalam dengan pejabat dinas atau pengguna layanan) atau pendekatan *mixed method*. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih kaya secara empiris dan mampu menjelaskan fenomena di balik angka-angka kuantitatif.

5) Analisis Kebijakan dan Reformasi Anggaran

Penelitian mendatang juga dapat meninjau bagaimana reformasi sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) memengaruhi efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan akuntabilitas fiskal pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, N., & Putri, A. (2015). Pengaruh efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja keuangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2025. Semarang: BPS.
- Bawole, J. N., Zawdie, G., & Kumi, E. (2017). Value-for-money audit for accountability and performance management in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 30(2), 101–121.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024. Semarang: Dishanpan Provinsi Jawa Tengah.
- Erica, R., et al. (2024). Analysis of public sector financial performance using value for money. Kabupaten Tangerang.
- Hardiansyah, T. (2024). Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Maryanti, S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 115–125.
- Nasution, A., dkk. (2024). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan Value for Money pada Dinas Kesehatan Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.

- Polii, F., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep Value for Money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 245–256.
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Analisis kinerja berdasarkan konsep Value for Money pada BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 22–31.
- Purwadinata, S. (2020). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan prinsip Value for Money (APBD Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Seran, M. S. B. (2021). Value for Money: Pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan Desa Subun Bestobe. *Jurnal Transparansi*, 3(1), 45–56.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas LKjIP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Polii, F., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep value for money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 245–256.
- Prasetyo, A., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Analisis kinerja berdasarkan konsep value for money pada BLUD Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 22–31.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakhid, Y., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran kinerja melalui pendekatan value for money pada pelaksanaan anggaran Dinas “X” di sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 44–57.

Widiastoeti, R., Ratnawati, & Nugroho. (2021). The role of value for money in public sector financial performance. *Journal of Public Administration*, 11(3), 77–90.

Wiraguna, A., Pambelum, Y. J., & Umbing, G. B. (2024). Analisis Value for Money APBD Kabupaten Katingan Tahun 2018–2022. *Jurnal Ekonomi Publik*.

